



► PEMILIHAN WALIKOTA

Pesta Demokrasi Gunakan Uang Rakyat Rp14,9 Miliar

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja telah menganggarkan dana pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) sebesar Rp14,9 miliar. Anggaran itu sudah disetujui melalui APBD murni 2016.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan nominal anggaran Pilwalkot 2017 itu sesuai dengan yang diajukan pada akhir tahun lalu. Pihaknya sudah memaparkan terkait kebutuhan anggaran tersebut dengan Pemerintah Kota Jogja dan DPRD sebelum pengesahan APBD 2016.

Menurutnya, sebagian besar anggaran Pilwalkot akan dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yang mencapai 63%. Belanja barang dan jasa di antaranya termasuk memfasilitasi kampanye pasangan calon (paslon), seperti pengadaan bahan kampanye, iklan, dan debat paslon. "Biaya honor komisioner KPU sampai petugas pemutakhiran data pemilih hanya 37%," kata Wawan sesuai menerima kunjungan Komisioner KPU RI di Kantor KPU DIY di Jalan Aipda Tut Harsono, Kamis (11/2).

Saat ini KPU Kota Jogja tinggal menunggu peraturan KPU (PKPU) resmi terkait tahapan pilkada serentak 2017, yang masih digodok oleh KPU RI.

Wawan menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilwalkot, tahun depan sebanyak 67%. Pihaknya ingin meningkatkan partisipasi pemilih karena dalam Pilwalkot dua periode sebelumnya masih jauh dari harapan.

Partisipasi pemilih di Pilwalkot 2006 hanya 53% dan Pilwalkot 2011 hanya naik sedikit menjadi 54% dari jumlah pemilih yang mencapai 329.000 di 2011. Dari hasil evaluasi yang dilakukan KPU Kota Jogja, minimnya partisipasi pemilih dikarenakan minimnya sosialisasi dan proses administrasi yang kurang maksimal.

Wawan mencontohkan, dalam Pilwalkot 2011 lalu jumlah pemilih mencapai 329.000 jiwa, namun dalam pemilihan anggota legislatif (pileg) 2014 lalu jumlah penduduk menurun menjadi 310.000 jiwa. Seharusnya, kata dia, semakin hari, jumlah penduduk bertambah, namun yang terjadi tidak demikian. "Ternyata banyak *ghost voters* [pemilih siluman]," kata Wawan.

Lebih lanjut, Wawan mengungkapkan minimnya partisipasi pemilih juga dikarenakan banyak warga Jogja memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jogja, namun berdomisili di luar Jogja. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005